BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Internasional

Salah satu pembahasan dalam memaparkan berbagai hubungan yang terjadi di dunia ini adalah hubungan internasional, yaitu dengan mempelajari manusia dan kebudayaan yang berbagai masyarakat diseluruh dunia. Hubungan internasional adalah kunci utama negara atau dasar–dasar negara sebagai dari salah satu bagian dari interaksi negara-negara dalam dunia internasional, dimana negara sebagai aktor utama.

Menurut Robert Jackson & George Sorenson dalam buku "Pengantar Studi Hubungan Internasional", mengemukakan bahwa:

> Alasan utama mengapa kita harus mempelajari hubungan interasional adalah adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi kedalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk system internasional yang akhirnya menjadi sistem global (2005:3).

Dari pemaparan tersebut bisa disimpulkan bahwa hubungan internasional merupakan suatu kebutuhan yang harus di pelajari dan dipahami, karena kebutuhannya sangatlah komplek pada dewasa ini dengan frekuensi yang tinggi.

Menurut Holsti yang dikutip oleh T. May Rudy dalam buku "Administrasi dan Organisasi Internasional", dinyatakan bahwa:

> Pola interaksi Hubungan Internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara-negara (state-actors) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (non-state actors) (2003:2).

Suatu interaksi dilakukan karena adanya saling membutuhkan diantara negara-negara tersebut. Melalui interaksi ini, akan terjalin suatu pola hubungan yaitu hubungan internasional. Pola hubungan atau interaksi tersebut dapat berupa kerjasama, persaingan dan pertentangan. Tentunya dalam berlangsungnya hubungan internasional yang diharapkan adalah berlangsungnya pola-pola kerjasama.

Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdepedensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar.

Hubungan internasional pada masa lampau berfokus pada kajian mengenai perang dan damai serta kemudian meluas untuk mempelajari perkembangan, perubahan dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antar negara atau antar bangsa dalam konteks sistem global tetapi masih bertitik berat kepada hubungan politik yang lazim disebut "*high politics*". Sedangkan hubungan internasional sekarang ini selain tidak lagi hanya memfokuskan perhatian dan kajiannya kepada hubungan politik yang berlangsung antar negara atau antar bangsa yang ruang lingkupnya melintasi batas-batas wilayah negara, juga telah mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara (*non-state actors*).

Seperti yang dinyatakan oleh DR. A. Agung Banyu Perwita dan DR. Yayan Mochamad Yani dalam buku "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional" menjelaskankan bahwa hubungan internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan sebagainya (2005:1).

Menurut Evans & Newham dalam bukunya *The Dictionary of World Poiltics* yang dikutip di dalam buku Perita & Yani mengartikan hubungan internasional sebagai suatu istilah yang digunakan untuk melihat seluruh interaksi antara aktor-aktor negara dengan melewati batas-batas negara (2005:4).

Mochtar Masoed mengemukakan hubungan internasional sebagai suatu prilaku, yang dijelaskan bahwa:

> Hubungan internasional juga mempelajari prilaku internasional, yaitu prilaku para aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Prilaku tersebut bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya (1990,28).

Walaupun pada dasarnya aktor yang efektif adalah negara, sehingga prilaku internasional yang paling banyak mendapat perhatian para analisis adalah prilaku negara, namun harus diperhatikan juga prilaku aktor-aktor non-negara.

Hubungan internasional itu sangat kompleks karena didalamnya terlibat bangsa-bangsa yang masing-masing berdaulat, sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit antara hubungan antara kelompok manusia dalam suatu negara. Saat ini makna dari hubungan internasional memiliki arti yang lebih luas, dimana hubungan internasional tidak hanya menekankan pada aspek politik saja seperti yang

dijelaskan oleh para pakar hubungan internasional di atas, akan tetapi juga pada unsur-unsur sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi.

Hubungan Internasional menurut M. Maso'ed yang dikutip dalam buku Perwita & Yani, mengartikan bahwa:

> Hubungan internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional,, organisasi non-pemerintah, serta individu-individu. Tujuan dasar studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para actor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional (2005:4-5).

Walaupun pada dasarnya aktor yang efektif adalah negara, sehingga perilaku internasional yang paling banyak mendapatkan perhatian para analisis adalah perilaku negara, namun harus juga diperhatikan aktor-aktor lain seperti aktor non-negara dan organisasi internasional.

2.2 Kerjasama Internasional

Dalam sebuah pemerintahan suatu negara, tidak ada sebuah negara yang mampu menjalankan negaranya tanpa membutuhkan negara lain. Oleh karena itu, terjadilah kerjasama-kerjasama antara 2 (dua) negara atau lebih dan dalam hubungan internasional dikenal dengan kerjasama internasional. Di dalam suatu kerjasama internasional ini bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negaranya sendiri. Kepentingan nasional suatu negara secara khusus merupakan unsur-unsur yang paling penting, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi.

Sejak awal, fokus dari hubungan internasional mempelajari penyebab-penyebab konflik dan kondisi-kondisi yang menciptakan kerjasama-kerjasama yang dapat tercipta sebagai akibat dari adanya penyesuaian-penyesuaian prilaku oleh para aktor dalam rangka merespon dan mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor lainnya.

Menurut James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff dalam bukunya "Contending Theories", mengemukakan bahwa:

> Kerjasama dapat dilakukan dalam suatu proses perundingan secara nyata diadakan atau karena masing-masing pihak sudah saling tahu, sehingga tidak perlu lagi diadakan suatu perundingan (1997:418).

Saat ini, sebagian besar transaksi dan interaksi antar negara dalam sistem internasional sekarang bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional, ataupun global yang bermunculan memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Dalam kebanyakan kasus yang terjadi, pemerintah saling berhubungan dengan mangajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu, dan mengakhiri perundingan dengan membentuk suatu perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak, proses seperti ini biasa disebut kerjasama.

Menurut DR. Anak Agung Banyu Perwita & DR. Yayan Mochamad Yani dalam buku Pengantar Hubungan Internasional, mengemukakan bahwa:

> Kerjasama Internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Hal tersebut memunculkan kepentingan yang beraekaragam sehingga mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi atas berbagai macam masalah tersebut maka beberapa negara membentuk suatu kerjasama internasional (2005:34).

Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi langsung diantara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah yang sama secara bersamaan. Bentuk kerjasama lainnya dilakukan antara negara yang bernaung dalam organisasi dan kelembagaan internasional.

Menurut T. May Rudy dalam buku "Administrasi dan Organisasi Internasional" ada 2 (dua) bentuk dan pola kerjasama, yaitu:

1. Kerjasama Pertahanan-Keamanan (Collective Security)
2. Kerjasama Fungsional (Functional Co-operation) (2009:8).

Sedangkan menurut Koesnadi Kartasasmita dalam bukunya "Organisasi dan Administrasi Internasional", dijelaskan pengertian kerjasama internasional yang dapat dipahami bahwa:

> Kerjasama dalam masyarakat internasional suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdepedensia dan bertambah kompleksnya hubungan manusia dalam masyarakat internasional. Kerjasama internasional terjadi karena *national understanding* serta mempunyai arah tujuan sama, keinginan yang didukung oleh kondisi internasionalyang saling membutuhkan. Kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara Negara-negara, namun kepentingan itu tidak identik (1997:20).

Isu utama dari kerjasama internasional yaitu sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral yang kompetitif. Dengan kata lain, kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang, seperti ideology, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan.

Penulis menyimpulkan bahwa Kerjasama internasional adalah salah satu usaha negara-negara untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang sama dan juga merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain. Kerjasama internasional pada umumnya berlangsung pada situasi-situasi yang bersifat desentralisasi yang kekurangan institusi-institusi dan norma-norma yang efektif bagi unit-unit yang berbeda secara kultur dan terpisah secara geografis, sehingga kebutuhan untuk mengatasi masalah yang menyangkut kurang memadainya informasi tentang motivasi-motivasi dan tujuan-tujuan dari berbagai pihak sangatlah penting.

2.3 Organsasi Internasional

2.3.1 Definisi dan Klasifikasi Organsasi Internasional

Dalam menjalankan hubungan internasional tidak hanya antar negara dengan negara saja atau individu dengan negara tetapi juga antara negara dan organisasi

internasional. Hal tersebut dikarenakan keberadaan organisasi internasional telah diakui keberhasilannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Organisasi internasional dapat diartikan sebagai ikatan formal yang melampaui batas-batas wilayah nasional yang ditetapkan untuk membentuk suatu mesin kelembagaan agar dapat memudahkan kerjasama di antara pihak yang terkait dalam berbagai bidang. Organisasi internasional sebagai aktor internasional dianggap memberikan keuntungan terhadap negara, dimana ia berperan aktif didalamnya.

Pada masa sekarang ini, dengan adanya perkembangan teknologi terutama dibidang transportasi, informasi, dan komunikasi memacu individu-individu dan kelompok lain yang tidak bergerak sebagai aktor negara untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain di luar negara mereka baik itu aktor negara maupun aktor non-negara lainnya. Semakin besarnya frekuensi kerjasama ditambah dengan adanya suatu kesamaan maksud dan tujuan dalam kerjasama tersebut membuat para aktor tersebut membentuk suatu organisasi internasional.

Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organizations*, Organisasi internasional adalah:

> Suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya (1983:35).

Dari pengertian organisasi internasional menurut Clive Archer diatas, *United Nations Children's Fund* (UNICEF) sebagai organisasi internasional yang beranggotakan pemerintah dari negara-negara yang berdaulat memiliki struktur

organisasi yang formal yang dibentuk berdasarkan kesepakatan negara-negara anggotanya yang bertujuan untuk mengejar kepentingan para anggotanya yaitu untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang kepada anak-anak sesuai dengan mandatnya.

Sedangkan menurut Duverger yang dikutip dalam buku Clive Archer mengatakan bahwa:

> Organisasi internasional merupakan suatu bentuk dari hubungan internasional yang berbentuk kolektif atau struktur dasar dari suatu organisasi sosial yang dibentuk atas dasar hukum atau tradisi manusia yang dapat berupa pertukaran, perdagangan, diplomasi, konferensi (1983:2).

Berdasarkan kutipan tersebut, bisa digambarkan bahwa UNICEF sebagai organisasi internasional yang didirikan oleh Majelis Umum PBB adalah suatu bentuk hubungan internasional, karena beranggotakan pemerintah dari negara-negara yang berbadan hukum.

Viotti dan Kauppi menjelaskan organisasi internasional dalam konteks pemegang peran. Mereka mengemukakan:

> Organisasi internasional dalam isu-isu tertentu berperan sebagai aktor yang independen dengan hak-haknya sendiri. Organisasi internasional juga memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan, memonitor dan menengahi perselisihan yang timbul dari adanya keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara-negara (1990: 228).

Berdasarkan penjelasan Viotti dan Kauppi tersebut menerangkan bahwa organisasi internasional dapat menjadi aktor independen. UNICEF sebagai salah satu organisasi internasional, tentunya memiliki peran yang sama yaitu menjadi aktor yang independen. Hal tersebut dikarenakan dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang

diambilnya berdasarkan kerangka konsepnya sendiri tanpa pengaruh dari negara / pihak manapun.

Teuku May Rudy berpendapat lebih lengkap dan menyeluruh tentang organisasi internasional, menurutnya definisi organisasi internasional adalah:

> Suatu pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda (2009:3).

Berdasarkan pengertian tersebut, dikemukakan bahwa organisasi menurut Rudy terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

1. Kerjasama yang ruang lingkupnya melintas batas negara.
2. Mencapai tujuan – tujuan yang disepakati bersama.
3. Baik antar pemerintah atau non-pemerintahan.
4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.
5. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan (2009:4).

Dari unsur-unsur organisasi internasional menurut T. Rudy tersebut bila dikaitkan dengan UNICEF sebagai salah satu organisasi internasional, tentunya mencakupi unsur-unsur tersebut. Hal tersebut dikarenakan UNICEF ruang lingupnya melintas batas negara; memiliki prioritas untuk mencapai tujuan-tujuannya; memiki struktur organisasi yang lengkap dan jelas; dan UNICEF menjalankan fungsinya sebagai organisasi internasional yang memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya.

Organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas dan strukturnya. Menurut Clive Archer dalam buku „International

Organization“, klasifikasi organisasi internasional berdasarkan keanggotaannya terbagi manjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. *Type of membership* (tipe keanggotaan)
   a. Inter-Governmental Organizations (IGO), yaitu organisasi internasional dengan wakil pemerintahan-pemerintahan sebagai angota.
   b. International Non-Governmental Organizations (INGO), yaitu organisasi internasional dimana anggotanya bukan mewakili pemerintahan.
2. *Extent of membership* (jangkauan keanggotaan)
   a. Keanggotaan yang terbatas dalam wilayah tertentu.
   b. Keanggotaan yang mencakup seluruh wilayah di dunia (1983:66).

Dari pemaparan klasifikasi organisasi internasional berdasarkan keanggotaannya tersebut bisa disimpulkan bahwa UNICEF merupakan *Inter-Governmental Organizations* (IGO), karena beranggotakan wakil pemerintahan-pemerintahan suatu negara. Selain itu dalam jangkauan keanggotaannya, UNICEF memiliki anggota yang mencakup seluruh wilayah di dunia tanpa terbatas pada suatu wilayah terntentu.

Klasifikasi organisasi internasional menurut tujuan dan aktivitasnya berkisar dari yang bersifat umum hingga yang khusus dan terbagi menurut orientasinya, yaitu menuju pada hubungan kerjasama para anggotannya, menurunkan tingkat konflik atau menghasilkan konfrontasi antar anggota atau yang bukan anggota.

Klasifikasi yang terakhir adalah berdasarkan struktur organisasi internasional. Dengan memperhatikan strukturnya, maka dapat dilihat bagaimana suatu institusi membedakan antara satu anggota dengan anggota lainnya, sehingga dengan demikian dapat dilihat bagaimana suatu organisasi internasional dalam memperlakukan

anggotannya. Selain itu, struktur juga dapat melihat tingkat kemandirian institusi dari anggotannya yang berupa pemerintahan dan melihat keseimbangan antara elemen pemerintahan dan yang bukan pemerintahan.

Struktur lembaga IGOs memiliki pola khusus, misalnya dengan adanya pegawai-pegawai permanen yang dipimpin oleh orang-orang profesional, dimana birokrasi-birokrasi permanen ini disebut sekretariat. Karyawannya dapat dianggap sebagai pegawai sipil internasional, dan diharapkan dapat mengembangkan kesetiaan yang bersifat supranasional atau kesetiaan terhadap organisasi dan bukan terhadap negaranya.

T. May Rudy memberikan penggolongan terperinci mengenai organisasi internasional menurut segi tinjauan berdasarkan 8 hal yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan administrasi : organisasi internasional antarpemerintah (*inter-governmental organization/IGO)* dan organisasi internasional nonpemerintahan (*nongovernmental organization / NGO*)
2. Ruang lingkup (wilayah) kegiatan dan keanggotaan : organisasi internasional global dan organisasi internasional regional
3. Bidang kegiatan (oprasional) organisasi, seperti bidang ekonomi, lingkungan hidup, pertambangan, komoditi (pertanian, industri), bidang bea cukai, perdagangan internasional dan lain – lain
4. Tujuan dan luas bidang kegiatan organisasi : organisasi internasional umum dan organisasi internasional khusus.
5. Ruang lingkup (wilayah) dan bidang kegiatan : global – umum, global - khusus, regional - umum dan regional – khusus.
6. Menurut taraf kewenangan (kekuasaan) : organisasi supranasional dan orgaisasi kerjasama.
7. Bentuk dan pola kerjasama : kerjasama pertahanan keamanan dan kerjasama fungsional.
8. Fungsi organisasi : organisasi politik (political organization), yaitu organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah – masalah politik dalam hubungan internasional; organisasi administratif, yaitu organisasi yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegitan teknis secara administratif;

> dan organisasi peradilan yaitu organisasi yang menyangkut penyelesaian sengketa pada berbagai bidang atau aspek (politik, ekonomi, sosial dan budaya) menurut prosedur hukum dan melalui proses peradilan (sesuai dengan ketantuan internasional dan perjanjian internasional) (2005:7-10).

Menurut Theodore A. Coulombis & James H. Wolfe dalam buku *Introduction to International Relations: Power and Justice*, IGOs dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori berdasarkan keanggotaan dan tujuannya, yaitu:

1. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya bersifat umum
   Organisasi ini memiliki ruang lingkup global dan melakukan berbagai fungsi, seperti keamanan, sosial-ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, pertukaran kebudayaan, dan lain sebagainya. Contohnya adalah PBB.
2. Organisasi yang keanggotaannya umum tetapi tujuannya terbatas
   Organisasi ini dikenal juga sebagai organisasi fungsional karena diabdikan untuk satu fungsi spesifik. Contohnya *International Labour Organization* (ILO), *World Health Organization* (WHO), *United Nations on AIDS* (UNAIDS), dan lain sebagainya.
3. Organisasi yang keanggotaannya terbatas tetapi tujuannya umum
   Organisasi seperti ini biasanya adalah organisasi yang bersifat regional yang fungsi dan tanggung jawab keamanan, politik dan social-ekonominya berskala luas. Contohnya adalah Uni Eropa, Organisasi Negara-negara Amerika (OAS), Uni Afrika, dan lain sebagainya.
4. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya terbatas
   Organisasi ini dibagi atas organisasi sosial-ekonomi, contohnya adalah Asosiasi Perdagangan Bebas Amerika Latin (LAFTA), serta organisasi militer/pertahanan, contohnya adalah *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dan Pakta Warsawa (1999: 281).

2.3.2 Fungsi Organisasi Internasional

Dalam mencapai tujuannya, organisasi internasional harus menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga, tujuan tersebut tidak menyimpang dari yang telah

ditetapkan. Selain untuk mencapai tujuannya, organisasi internasional juga harus memiliki fungsi terhadap anggota-anggotannya.

Menurut Clive Archer, secara umum fungsi organisasi internasional dapat dibagi ke dalam sembilan fungsi, yaitu:

1. Artikulasi dan agregasi
   Organisasi internasional berfungsi sebagai instrument bagi negara untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingannya, serta dapat mengartikulasikan kepentingannya sendiri. Organisasi internasional menjadi salah satu bentuk kontak institusionalisme antara partisipan aktif dalam sistem internasional, yaitu sebagai forum diskusi dan negosiasi.
2. Norma
   Organisasi internasional sebagai aktor, forum dan instrument yang memberikan kontribusi yang berarti bagi aktivitas-aktivitas normatif dari sistem politik internasional. Misalnya dalam penetapan nilai-nilai atau prinsip-prinsip non-diskriminasi.
3. Rekrutmen
   Organisasi internasional menunjang fungsi penting untuk menarik atau merekrut partisipan dalam sistem politik internasional.
4. Sosialisasi
   Sosialisasi berarti upaya sistematis untuk mentransfer nilai-nilai kepada seluruh anggota sistem. Proses sosialisasi pada level internasional berlangsung pada tingkat nasional yang secara langsung mempengaruhi individu-individu atau kelompok-kelompok di dalam sejumlah negara dan di antaranya negara-negara yang bertindak pada lingkungan internasional atau di antara wakil mereka di dalam organisasi. Dengan demikian, organisasi internasional memberikan kontribusi bagi penerimaan dan peningkatan nilai kerjasama.
5. Pembuat peraturan
   Sistem internasional tidak mempunyai pemerintahan dunia, oleh karena itu, pembuatan keputusan internasional biasanya didasarkan pada praktek masa lalu, perjanjian *ad hoc*, atau oleh organisasi internasional.
6. Pelaksanaan peraturan
   Pelaksanaan keputusan organisasi internasional hampir pasti diserahkan kepada kedaulatan negara. Di dalam prakteknya, fungsi aplikasi aturan oleh organisasi internasional seringkali lebih terbatas pada pengawasan pelaksanaannya, karena aplikasi sesungguhnya ada di tangan negara anggota.

7. Pengesahan peraturan
   Organisasi internasional bertugas untuk mengesahkan aturan-aturan dalam system internasional. Fungsi ajudikasi dilaksanakan oleh lembaga kehakiman, namun fungsi ini tidak dilengkapi dengan lembaga yang memadai dan tidak dibekali oleh sifat yang memaksa sehingga hanya terlihat jelas bila ada pihak-pihak negara yang bertikai.
8. Informasi
   Organisasi internasional melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi.
9. Operasional
   Organisasi internasional menjalankan sejumlah fungsi operasional di banyak hal yang sama halnya seperti dalam pemerintahan. Fungsi pelaksanaan yang dilakukan organisasi internasional terlihat pada apa yang dilakukan oleh UNHCR yang membantu pengungsi, *World Bank* yang menyediakan dana, UNICEF yang melakukan perlindungan terhadap anak-anak, dan lain sebagainya (1983:69-78).

2.3.3 Teori dan Peranan Organisasi Internasional

2.3.3.1 Teori Peranan

Suatu organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Masing-masing struktur memiliki fungsinya sendiri yang mengacu pada tujuan dari organisasi yang telah disepakati bersama. Apabila struktur-struktur itu telah menjalankan fungsi-fungsinya maka organisasi itu telah menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian maka peranan dapat dianggap sebagai fungsi baru dalam rangka pengajaran tujuan-tujuan kemasyarakatan.

Sedangkan teori peranan menurut Soerjono Soekarto bahwasannya mencakup tiga artian, yaitu:

- Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan peraturan-peraturan yang dibimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

- Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang paling penting bagi struktur sosial masyarakat (1990:269).

Menurut M. Mas'oed sendiri dalam bukunya "Ilmu Hubungan Internasional", mengartikan Peranan (*rule*) adalah:

> perilaku yang diharapkan akan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah periaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut (1990:44).

2.3.3.2 Peranan Organisasi Internasional

Setiap organisasi internasional pastilah memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsinya, maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan tertentu.

> Peran organisasi internasional adalah sebagai berikut: 1) Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik (sesama anggota); 2) Sebagai sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan; 3) Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan sosial, kemanusiaan, bantuan pelestarian lingkungan hidup, peace keeping operation dan lain-lain) (Perwta & Yani,2005:27).

L. Bennet membagi peranan organisasi internasional dalam 3 (tiga) kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Organisasi intrnasional sebagai sumber legitimasi kolektif bagi aktifitas-aktifitas organisasi atau anggota secara individual.
2. Organisasi internasional sebagai penentu agenda internasional.
3. Organisasi internasional sebagai wadah bagi koalisi antar anggota atau koordinasi kebutuhan antar pemerintah sebagai mekanisme untuk menentukan karakter dan struktur kekuasaan global (1995:8).

Menurut Clive Archer, yang dikutip oleh Perwita dan Yani, menjelaskan bahwa peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Sebagai instrumen. Organisasi Internasional digunakan oleh negara – negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota – anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah – masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah – masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.
3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan – keputusan sendiri tanpa dipengaruhi olleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (2005:95).

Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat internasional, organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggotannya, setiap anggota tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya.

Peran pertama dari organisasi internasional adalah sebagai instrumen digunakan oleh anggota-anggotanya untuk tujuan tertentu, biasanya terjadi pada IGO, dimana anggota-anggotanya merupakan negara berdaulat yang dapat membatasi tindakan-tindakan organisasi internasional. Peranan organisasi internasional sebagai instrumen dianggap mempunyai suatu kekuatan yang sangat mendukung bagi kepentingan nasional suatu negara. Gambaran dari organisasi internasional sebagai instrumen bagi anggotanya tidak berarti bahwa setiap keputusan yang diambil oleh

organisasi internasional itu bertujuan untuk memenuhi setiap kepentingan anggotanya.

Ketika suatu organisasi internasional dibuat, maka implikasinya adalah diantara negara-negara suatu kesepakatan terbatas telah disetujui dalam bentuk instrumental untuk pengaturan secara multilateral aktivitas negara-negara dalam lingup tertentu. Organisasi penting bagi kepentingan kebijakan nasional dimana koordinasi multilateral tetap menjadi sasaran jangka panjang pemerintah nasional (Archer,1983:130-131).

Peranan kedua organisasi internasional sebagai arena atau forum, dimana didalamnya terjadi aksi-aksi. Dalam hal ini organisasi internasional menyediakan tepat-tempat pertemuan bagi anggotanya untuk berkumpul bersama-sama untuk berdiskusi dan bekerjasama. Sebagai suatu arena, organisasi internasional berguna bagi masing-masing kelompok yang bersaing untuk menjadi forum bagi pandangan mereka serta dapat pula menjadi kekuatan diplomatik bagi kebijakan-kebijakannya, baik di waktu perang dingin ataupun perang dekolonialisasi (Archer,1983:136).

Peran ketiga dari organisasi internasional adalah sebagai aktor yang independen, dimana independen diartikan apabila organisasi internasional dapat bertindak tanpa dipengaruhi kekuatan dari luar. Dalam hal ini, organisasi internasional dapat memberikan masukan-masukan secara netral tanpa ada kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dari luar.

2.4 Pendidikan

Fenomena yang terjadi dengan kehadiran arus globalisasi menyebabkan terjadinya berbagai macam perubahan dalam tingkat regional, nasional, dan internasional yang dipicu dengan cepatnya perkembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan - perubahan tersebut berhubungan dengan perubahan prilaku dan tata nilai dalam kehidupan masyarakat. Persoalan utama yang dihadapi oleh negara-negara di dunia dalam menghadapi arus globalisasi tersebut adalah dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM). Untuk menghasilkan SDM yang dimaksud tersebut tentunya ditempuh melalui pendidikan, oleh karena itu pendidikan sangatlah penting dalam membangun kemajuan suatu negara (Dinas Pendidikan Jawa Barat,2008:iv).

Pada prosesnya, permasalahan pendidikan merupakan pergeseran dari isu nasional yang berkembang menjadi isu global. Dapat dipaparkan bahwa isu global merupakan permasalahan dan tantangan yang secara berkaitan dengan unsur-unsur atau keperluan dasar akan perkembangan dan kemajuan internasional. Permasalahan pendidikan merupakan permasalahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa. Hal tersebut dikarenakan pendidikan merupakan hal yang utama dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang pada akhirnya dapat mempengaruhi berbagai bidang di dalam perkembangan dan kemajuan suatu negara di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya bangsa.

2.4.1 Pengertian Pendidikan

Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (http://www.depdiknas.go.id /content.php?content=file_sispen – Di unduh 04 Oktober 2009).

Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana guna mewujudkan suasana belajar dan proses pembangunan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Moh. Yamin dalam bukunya "Menggugat pendidikan Indonesia" mengemukakan bahwa:

> Pendidikan adalah media mencerdaskan kehidupan bangsa dan membawa bangsa ini pada era *aufklarung* (Pencerahan). Pendidikan bertujuan untuk membangun tatanan bangsa yang berbalut dengan nilai-nilai kepintaran, kepekaan, dan kepedulian terhadap kehidupan bernegara (2009:15).

Sedangkan pengertian pendidikan yang dipaparkan oleh Brubacher yang dikutip dalam buku Mushari yaitu suatu bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk mengembangkan dan memfungsionalkan

rohani (pikir, rasa, karsa, cipta dan budi nurani) manusia; dan jasmani (pancaindera dan keterampilan) manusia agar meningkat wawasan pengetahuannya sebagai bekal keberlangsungan hidup ditengah masyarakat (2007:48).

Dari beberapa pemahaman tentang pendidikan diatas, jelaslah bahwa pendidikan sangatlah penting, karena pendidikan merupakan sebuah sarana atau media yang dapat memajukan suatu negara melalui sumber daya manusia yang dihasilkan melalui pendidikan tersebut.

2.4.2 Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dimana dalam pendidikan dasar anak-anak belajar mengerti untuk saling berinteraksi dan saling menghargai satu samalainnya, karena pendidikan dasar merupakan interaksi yang pertama selain keluarga bagi anak-anak dengan individu-individu lainnya.

Pendidikan dasar di Indonesia ditempuh selama 9 (sembilan) tahun yang terbagi kedalam 2 (dua) tahap, yaitu 6 (enam) tahun Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan 3 (tiga) tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) (http://id.wikipedia.org/wiki/pendidikan_dasar - Di unduh 04 Oktober 2009).

Pendidikan Dasar ini merupakankunci utama bagi para anak didik agar menjadi individu yang pada suatu saat nanti menjadi sumber daya manusia yang bermutu. Untuk mewujudkan hal tersebut, diharapkan anak didik dapat benar-benar memahami dan menyerap ilmu yang mereka terima dengan baik,agar pada saatnya mereka memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi mereka memiliki kemampuan yang lebih baik.